

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Invasi Amerika Serikat ke Irak merupakan salah satu konflik bersenjata terbesar pascaperang dingin, mulai dari total penggunaan senjata militer oleh kedua negara, korban jiwa (baik sipil maupun pasukan militer), hingga dampak konflik jangka panjang yang masih terlihat hingga hari ini, seperti krisis keamanan, kemiskinan, korupsi, dan lain sebagainya. Invasi yang terjadi kurang lebih selama dua bulan ini (Maret hingga April tahun 2003)¹ telah membawa Irak ke dalam instabilitas dari berbagai sektor, mulai dari sistem politik, ekonomi, serta lemahnya jaminan keamanan bagi warga Irak.

Berdasarkan laporan yang dirilis oleh Bank Dunia, perekonomian Irak mengalami penurunan yang signifikan, hal tersebut dapat dilihat dari GDP Irak pada tahun 1980 sebesar US\$3,375 dan semakin menurun menjadi US\$1,665 pada tahun 2006.² Selain itu, PBB dan pemerintah Irak pada tahun 2004 menyatakan bahwa sepertiga penduduk Irak hidup dalam kondisi miskin, bahkan 5% di antaranya berada dalam tingkat kemiskinan yang ekstrim, salah satu penyebabnya karena rusaknya infrastruktur di Irak selama masa konflik.³

Dalam jurnal penelitian yang berjudul *Reconstructing Gender: Iraqi Women Between Dictatorship, War, Sanctions and Occupation*, Nadjie Al-Ali (2005) menjelaskan bahwa level kekerasan yang terjadi di Irak semakin parah dan

¹ Andri Ansari Tarigan. *Skripsi: State Building di Irak Pascapemerintahan Saddam Hussein* (Medan, Universitas Sumatera Utara, 2009), 80

² World Bank. "Confronting Poverty in Iraq: Main Findings." Washington, DC: World Bank, 2011, <http://documents.worldbank.org/curated/en/2011/01/13358792/confronting-poverty-iraq-main-findings> (Diakses Agustus 2015), 15

³ Christian Berthelsen, "Poverty is another war rolling through Iraq," *Los Angeles Times*, Februari 2007, <http://articles.latimes.com/2007/feb/19/world/fg-poverty19> (diakses November 2015).

meningkat dari waktu ke waktu pada masa pascakonflik⁴. Hampir setengah juta orang tewas dalam perang di Irak sejak invasi yang dilakukan oleh Amerika sejak tahun 2003 hingga pertengahan 2011.⁵ The *UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)* pada tahun 2007 juga menggambarkan situasi yang terjadi di Irak pada saat itu sebagai salah satu situasi paling kompleks dan penuh dengan kekerasan di dunia, ditandai dengan berbagai macam bentuk pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan internasional.⁶

PBB sendiri memperkirakan bahwa hingga delapan juta warga di Irak membutuhkan bantuan darurat.⁷ Berdasarkan laporan yang dirilis oleh UNAMI (*UN Assistance Mission for Iraq*), sekitar 54% populasi hampir tidak bisa bertahan dengan pendapatan hanya kurang dari 1 *dollar* per hari, dan 15% dari jumlah tersebut hidup dalam kemiskinan yang ekstrem⁸. Namun, dari keseluruhan korban pada masa invasi dan pascainvasi Amerika, perempuan menempati porsi terbesar. Pernyataan tersebut diperkuat dengan data dari PBB bahwa sekitar tujuh juta warga Irak hidup di bawah garis kemiskinan dan lebih dari setengahnya adalah perempuan.⁹

Ketika berbicara mengenai perang, hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari pengertian mengenai konflik. Menurut Lewis Coser, konflik merupakan

⁴Nadje Al-Ali, "Reconstructing Gender: Iraqi Women Between Dictatorship, War, Sanctions and Occupation," *Journal Third World Quarterly Routledge*, Vol.26, No. 4-5 (April 2005), 742.

⁵ Kerry Sheridan. "Iraq Death Toll Reaches 500,000 Since Start Of U.S.-Led Invasion, New Study Says." *Huffington Post*, 15 Oktober 2013. http://www.huffingtonpost.com/2013/10/15/iraq-death-toll_n_4102855.html (Diakses 25 Juni 2015).

⁶ *A Joint Statement to the 7th Session of The Human Rights Council by Several NGOs*. "Human Rights Situation in Iraq." <http://www.currentconcerns.ch/index.php?id=620/html> (Diakses 6 Mei 2015).

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

⁹ *United Nations General Assembly*. "Human Rights Council twenty-second session Agenda item 3 : Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development, A/HCR/22/NGO/155." February 25, 2013. http://www.gicj.org/NOG_REPORTS_HRC_22/womenunderoccupation.pdf (Diakses Juni 2015), 5

perjuangan untuk memperebutkan nilai dan kepemilikan atas status, *power*, dan sumber daya yang terbatas.¹⁰ Salah satu cara untuk mencapai tujuan dalam konflik itu sendiri adalah melalui kekerasan sehingga perilaku serta perspektif negara terhadap perang tersebut yang menjadi salah satu isu utama yang dikritik dalam studi feminis. Dalam buku Cynthia Enloe yang berjudul *Bananas, Beaches, and Basis: Making Feminist Sense of International Politics* dapat dilihat bahwa perang yang dilakukan oleh negara merupakan tindakan yang tidak hanya merugikan negara yang lebih lemah, tetapi juga perempuan yang ada di dalamnya.¹¹ Hal tersebut juga dapat dilihat dalam situasi yang terjadi di Irak, salah seorang aktivis hak asasi perempuan di Irak menyatakan bahwa korban terbesar pada masa pascainvasi di Irak adalah perempuan.

*“The biggest victims in Iraq are young women. They are widowed, trafficked, forced into early marriages, beaten at home and sexually harassed if they leave the house, which is a new phenomenon in Iraq.” (Women’s rights activist, Human Rights Watch, Baghdad, 8 April 2010).*¹²

Pascainvasi, kekacauan yang muncul berhasil menciptakan sebuah “*climate of fear*”, di mana perempuan Irak takut untuk meninggalkan rumah mereka karena tingkat pencurian dan kekerasan yang meningkat. Selain itu, *Human Rights Watch* menuding bahwa pasukan koalisi pimpinan AS, “gagal untuk menyediakan keamanan publik di Baghdad”.¹³ Berdasarkan Konvensi Jenewa, ketika suatu negara berada di bawah okupasi negara lain, maka pihak yang mengokupasi wajib untuk menjamin perlindungan bagi masyarakat di negara

¹⁰ Fitri Bintang Timur. “Pemeriksaan Perempuan dalam Konflik,” dalam *Gender dan Hubungan Internasional*, ed. Ani Soetjipto dan Pande Trimayuni (Yogyakarta: Jalasutra, 2013), 120.

¹¹ Ani Soetjipto dan Pande Trimayuni (ed.). *Gender dan Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Jalasutra, 2013), 98.

¹² *Human Rights Watch* “Iraq at a Crossroads.” 2010.

<https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf> (Diakses Juni 2015), 6

¹³ *Ibid*, 6

tersebut.¹⁴ Selain itu, Pasal 27 dalam Konvensi Jenewa Keempat juga menekankan perlindungan khusus terhadap perempuan dalam masa konflik.

“Women shall be especially protected against any attack on their honor, in particular against rape, enforced prostitution, or any form of indecent assault.”¹⁵

Bentuk kekerasan terhadap perempuan di Irak pascainvasi mulai muncul dalam berbagai bentuk, seperti penculikan, pembunuhan, pemerkosaan, hingga menjadi korban dari jaringan organisasi penjualan perempuan.¹⁶ Berdasarkan laporan yang dirilis oleh *Woman Freedom Organization (WFO)*, sebuah NGO yang berbasis di Baghdad-Irak pada tahun 2006, lebih dari dua ribu perempuan Irak diculik sejak April 2003. Hasil dari survey tersebut menunjukkan bahwa para perempuan ini sebagian besar diculik untuk dijual sebagai pekerja seks diluar negeri, terutama di negara-negara Teluk, Yaman, Suriah, dan Yordania. Hal ini sebenarnya bukan hal baru yang terjadi di Irak, kasus-kasus seperti ini sudah ada bahkan pada rejim Saddam sebelumnya, namun semakin parah dan meningkat drastis pascainvasi karena krisis yang ditimbulkan selama dan pascakonflik yang berakibat pada hancurnya sistem perekonomian Irak serta kemiskinan yang menjalar dalam sistem sosial masyarakat. Perempuan dianggap sebagai salah satu objek ‘penting’, di mana kelemahan mereka dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat lain yang didominasi laki-laki sebagai target tindakan kejahatan.¹⁷

Jika dibandingkan dengan situasi sebelum serangkaian perang yang terjadi di Irak, sekitar tahun 1970-an perempuan Irak pernah menjadi masyarakat yang

¹⁴ Bonnie Sarigianis, "Women in the New Iraqi State," *Dickinson College Honors Theses*. Paper 175 (Spring, 2014), 12

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Global Research*. "Violence Against Women in Iraq Under US Occupation." *Global Research*, 2006. <http://www.globalresearch.ca/violence-against-women-in-iraq-under-us-occupation/2118> (Diakses 15 April 2015).

¹⁷ *Ibid*

paling berpendidikan dibandingkan negara-negara lain di kawasan Timur Tengah.¹⁸ Pada masa sebelum sanksi ekonomi dan invasi militer yang dijatuhkan atas Irak, para perempuan Irak mendapatkan hak terhadap akses pendidikan hingga ke perguruan tinggi, pemberantasan tingkat buta huruf bagi perempuan juga dilakukan hingga ke pelosok negeri. Mulai terbukanya akses perempuan untuk masuk kedalam ruang politik, bahkan akses bagi perempuan untuk berperan sebagai pekerja profesional. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh *the days of plenty* atau tajamnya peningkatan perekonomian Irak karena melimpahnya hasil ekspor minyak mentah Irak¹⁹.

Pemerintah memberlakukan kebijakan tersebut atas dasar kebutuhan negara akan pekerja profesional yang diambil dari masyarakat lokal sendiri, disisi lain para perempuan Irak mendapatkan fasilitas yang baik dan memadai dari pemerintah, bahkan Irak sempat memenangkan penghargaan dari UNESCO (*UN Educational, Scientific, and Cultural Organization*) pada tahun 1988 untuk pencapaian Irak dalam pemberantasan angka penduduk buta huruf di Irak.²⁰ Namun, perubahan kondisi perekonomian serta politik yang diakibatkan konflik beruntun, seperti Perang Teluk (1990 dan 1991), sanksi ekonomi (1991-2003), hingga invasi oleh AS, langsung menambah daftar panjang krisis yang terjadi Irak dan membawa kehidupan perempuan pada level terendah sebagai pihak yang dirugikan akibat perang.²¹ Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dianalisis mengenai bagaimana perempuan di Irak mengorganisir diri dalam suatu bentuk gerakan dalam merespon krisis yang mereka alami karena dampak invasi dengan

¹⁸ Nadjie Al-Ali and Nicola Pratt. *What Kind of Liberation: Women and the Occupation of Iraq* (Berkeley: University of California Press, 2009), 21-22.

¹⁹ *Ibid*, 31-33

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*, 46-50

menuntut pembentukan regulasi yang fokus terhadap perlindungan hak asasi perempuan di Irak pascainvasi yang dimulai pada April 2003.

Dalam merespon situasi yang terjadi di Irak, beberapa aktor internasional menegaskan pentingnya untuk membahas serta mengambil tindakan mengenai ancaman keamanan terhadap situasi perempuan di Irak. Hal tersebut dapat dilihat melalui diselenggarakannya sesi ke-13 Komite CEDAW (*Convention for the Elimination of Discrimination Against Women*) yang diadakan di markas besar PBB di New York pada Januari 2004. Sesi ini berfokus mengenai situasi terkini mengenai hak-hak perempuani Irak²², khususnya tentang keputusan dari Dewan Pemerintahan Irak pada Desember 2003 mengenai undang-undang sipil terkait aturan pernikahan, perceraian, tahanan anak-anak, serta warisan.²³ “*Women’s and girls rights are human rights,*” pernyataan secara universal yang dikeluarkan oleh PBB pada forum Deklarasi Beijing dan Platform Aksi (*Beijing Declaration and Platform for Action*) pada tahun 1995 menjadi kerangka perlindungan untuk menjamin hak-hak perempuan serta bebas dari segala bentuk diskriminasi.²⁴ Selain itu, pembentukan *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang diadopsi pada tahun 1979 oleh Majelis Umum PBB, menguraikan secara jelas mengenai hak asasi perempuan

²² Hak-hak dan kebebasan perempuan sendiri dijelaskan secara detail dalam Pasal 1 CEDAW, antara lain: hak untuk hidup; hak untuk tidak mengalami penganiyaan, kekejaman, perbuatan atau hukuman yang menurunkan martabat dan tidak berperikemanusiaan; hak untuk mendapatkan perlindungan yang sama sesuai norma-norma kemanusiaan pada saat konflik bersenjata internasional maupun domestik; hak atas kebebasan dan keamanan seseorang; hak atas persamaan perlindungan berdasar hukum; hak atas persamaan dalam keluarga; hak atas kesehatan mental dan fisik yang sesuai dengan standar yang tinggi yang dapat dicapai, serta hak atas kondisi kerja yang baik dan adil.

²³ CEDAW 30th Session. “Statement by the Committee on the Elimination of Discrimination against Women on the Situation of Women in Iraq.”, 12 to 30 January 2004. <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/30sess.htm> (Diakses Juni 2015).

²⁴ UN Women. “Human Rights of Women.” <http://beijing20.unwomen.org/en/in-focus/human-rights> (Diakses 24 Juni 2015).

yang juga disebut sebagai rancangan undang-undang internasional hak-hak perempuan.²⁵ Irak sendiri telah menyetujui dan meratifikasi CEDAW pada tahun 1986, namun belum meratifikasi *Optional Protocol*²⁶ mengenai kekerasan terhadap perempuan.²⁷ Oleh karena itu, penjabaran yang tertuang dalam CEDAW menjadi rujukan penting dalam proses pencapaian hak fundamental dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan serta mempengaruhi bangkitnya pergerakan kaum perempuan di Irak dalam memperjuangkan hak asasi mereka pada masa transisi politik di Irak.

Pada April 2003, berbagai organisasi perempuan mulai muncul hampir di seluruh kawasan Irak sebagai respon terhadap kekerasan yang terjadi pada perempuan serta sebagai usaha untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Para kelompok perempuan di Irak melihat momentum isu demokrasi yang dibawa oleh Amerika dapat menjadi celah bagi mereka untuk membentuk pergerakan perempuan di Irak dan meningkatkan peran mereka dalam lingkup publik. Sebagian besar dari organisasi ini, seperti *National Council of Women (NCW)*, *the Iraqi Women's Higher Council (IWHC)*, *the Iraqi Independent Women's Group*, serta *Society for Iraqi Women for the Future* yang dibentuk baik oleh anggota *Iraqi National*

²⁵ *CEDAW Report*. "Status of submission and consideration of reports submitted by States parties under article 18 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women." August 31, 2006.

<http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw%20report%20submission%20status%2031Aug2006.pdf> (Diakses 24 Juni 2015).

²⁶ *Optional Protocol* atau Protokol Opsional pada CEDAW diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada Desember 1999 dan didalam Protokol Opsional ini memberi hak kepada perempuan untuk mengajukan pengaduan perorangan kepada komite mengenai segala pelanggaran hak yang dimuat dalam Konvensi oleh pemerintahnya (*The Communication Procedure*), serta di lain pihak memberikan wewenang kepada Komite untuk melakukan investigasi atas pelanggaran berat dan sistematis yang korbannya adalah perempuan di negara-negara yang telah meratifikasi atau akses pada Protokol ini (*The Inquiry Procedure*), dikutip dalam *Konvensi CEDAW*. "Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)."

<http://www.unwomen-eseasia.org/projects/Cedaw/docs/KonvensiCEDAWtextBahasa.pdf> (Diakses Juli 2015).

²⁷ *OECD Development Centre*. "Social Institution and Gender Index" (2014)

<http://www.genderindex.org/country/iraq> (Diakses Juni 2015).

Congress ataupun para perempuan profesional yang memiliki hubungan dekat dengan partai politik.²⁸ Namun, beberapa organisasi perempuan di Irak tidak hanya dibentuk oleh para perempuan dari kalangan elit, misalnya saja *The Iraqi Women's Network (Al-Shabaka al Mar'a al'Iraqiyya)* yang memiliki anggota lebih dari delapan puluh organisasi perempuan di seluruh Irak.²⁹ Perempuan yang terlibat dalam organisasi ini mayoritas berasal dari kalangan masyarakat perkotaan, kelas menengah, dari berbagai latar belakang etnis dan agama. Organisasi ini terlibat dalam bantuan kemanusiaan dan kegiatan pelatihan untuk perempuan Irak yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan tambahan, bantuan hukum, layanan kesehatan gratis dan konseling, serta advokasi politik dan lobi.

Ada dua poin penting yang menarik para perempuan untuk bergabung dalam organisasi ini, pertama adalah sebagai perlawanan terhadap Resolusi 137³⁰; kedua adalah usaha untuk membentuk sistem kuota bagi perempuan di Dewan Nasional.³¹ Organisasi-organisasi perempuan di Irak bersama-sama terlibat dalam kegiatan untuk menyampaikan kepentingan mereka dan mengupayakannya melalui strategi lobi dan kampanye.³²

Secara khusus, kampanye yang dilakukan oleh para organisasi perempuan ini mencakup : 1) melaksanakan kampanye sebagai upaya untuk menggantikan status hukum perkawinan yang cenderung progresif, perceraian dan perwalian anak karena penerapan hukum yang lebih konservatif (Resolusi 137),

²⁸ Nadjé Al-Ali, "Reconstructing Gender." Hal: 754

²⁹ Nadjé Al-Ali and Nicola Pratt. "Women's Organizing and the Conflict in Iraq Since 2003." *Feminist Review Journal* 88, Palgrave (2008),78

³⁰ Resolusi 137 melarang *Personal Status Law* yang disahkan tahun 1959 dan menggantinya dengan hukum berbasis syariah yang diatur oleh pemimpin agama.

³¹ *Ibid*, 755

³² Nadjé Al-Ali. "Women's Organizing",76.

memperjuangkan kuota untuk perempuan sebagai representasi formal di pemerintahan baik pada level pusat, regional, maupun lokal; 3) menentang pelanggaran oleh partai politik dan kelompok militan atas nama Islam; 4) berusaha membatasi peran Islam dalam jaminan hukum yang berkaitan dengan konvensi internasional, termasuk di dalamnya CEDAW; serta 5) melawan ancaman pembunuhan terhadap perempuan yang bekerja dalam lingkup profesional dan aktivis hak asasi perempuan.³³

Dalam istilah 'kepentingan praktis', kelompok perempuan Irak mengorganisir pelatihan untuk perempuan dalam berbagai bentuk keterampilan dan kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan bagi mereka, mulai dari peternakan lebah hingga kegiatan menjahit, penyediaan layanan kesehatan serta bantuan kemanusiaan untuk perempuan dan keluarga mereka.³⁴ Tuntutan mengenai hukum status personal (*personal status law*) yang tertuang dalam Resolusi 137³⁵ menjadi faktor pendorong bagi mobilisasi sebagian kelompok pergerakan perempuan Irak.³⁶ Hal ini diidentifikasi sebagai titik balik meningkatnya aktivisme kelompok pergerakan perempuan di Irak, karena situasi tersebut berkontribusi terhadap bersatunya perempuan dalam mempertahankan hak mereka, memberikan dorongan untuk melobi jumlah kuota untuk perempuan serta penghapusan Resolusi 137.³⁷

Selama proses transisi politik di Irak, Letnan Paul Bremer yang ditunjuk sebagai duta besar oleh AS pada masa proses transisi politik di Irak lebih fokus

³³ *Ibid*, 76

³⁴ *Ibid*

³⁵ Resolusi 137 resmi diumumkan ke publik pada 12 Januari 2004, dikutip dari Bonnie Sarigianis. "Women in the New Iraqi State," hal: 16

³⁶ Nadje Al-Ali and Nicola Pratt. *Women's Organizing*, hal: 78

³⁷ *Ibid*

pada isu perimbangan sektarian yang berimbang pada terbaikannya isu mengenai representasi perempuan di Dewan Pemerintahan Irak (*Iraqi Governing Council/IGC*). Selain itu, Bremer juga tidak setuju dengan ide mengenai kuota gender di IGC karena Bremer berusaha agar legitimasi politiknya tidak berkurang dan juga untuk mendapatkan dukungan dari kelompok partai Islam.³⁸ Hal tersebut dapat dilihat dari total 28 anggota yang duduk di dewan, hanya terdapat tiga anggota perempuan, dan dari ketiga perempuan ini hanya dua orang yang memiliki pengalaman politik.³⁹

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah Irak belum serius dalam memprioritaskan isu-isu perempuan di Irak, bahkan di dalam lingkup kekuasaan politik pun perempuan tidak mendapatkan porsi yang adil.⁴⁰ Sejumlah permasalahan muncul ketika pemerintah menetapkan isu yang mempengaruhi perempuan namun tanpa meminta pendapat ataupun masukan dari perempuan.⁴¹ Studi feminis mengidentifikasi permasalahan ini sebagai strategi buta-gender (kebijakan yang akan menguntungkan laki-laki diasumsikan juga akan menguntungkan bagi perempuan).⁴² Dengan kata lain, langkah ataupun kebijakan yang telah memberikan manfaat terhadap perempuan di wilayah lain dianggap juga akan bekerja jika diterapkan di Irak, tanpa meletakkan perhatian khusus terhadap situasi atau pengalaman perempuan di Irak.

Isu mengenai hak asasi perempuan di Irak masih terus berlanjut hingga hari ini. Pada tahun 2014, Koalisi NGO dari Irak yang terdiri dari *Iraqi Women*

³⁸ Bonnie Sarigianis. "Women in the New Iraqi State," hal: 16

³⁹ *Ibid*, 16

⁴⁰ Sherifa Zuhur. "Traveling Apart: Women's Empowerment and Public Policy in Iraq." Women's accessibility to equality in citizenship. Volume 2. Center for Strategic and Policy Studies Papers. Hebrew University of Jerusalem, Federmann School of Public Policy & Government. (December, 2006), 17

⁴¹ *Ibid*

⁴² *Ibid*, 19

Network, Rafidain Women Coalition, serta hasil dari pertemuan “No to violence Against Women in Kirkuk”, berhasil menyusun *CEDAW Shadow Report*, di mana salah satu isu yang mereka sorot adalah representasi perempuan dalam politik yang menurun di level kementerian dari total enam orang di kementerian pada tahun 2004, berkurang menjadi 4 orang pada tahun 2006, dan akhirnya hanya tinggal satu orang perempuan di pemerintahan pada tahun 2010.⁴³ Situasi ini muncul karena kuota yang lebih besar diberikan kepada kelompok sektarian serta diskriminasi terhadap perempuan dalam lingkungan politik di Irak. Posisi Wakil Menteri yang ditempati oleh perempuan di Irak juga menurun drastis, dari total delapan orang pada tahun 2005 dan pada tahun 2010 hanya ditempati oleh satu orang perempuan. Namun, periode masa pemerintahan transisi di Irak menjadi titik penting perjuangan gerakan perempuan di Irak karena pada masa ini regulasi akan disusun untuk diimplementasikan pada pemerintahan permanen yang akan dibentuk pascainvasi.

Dari keseluruhan pemaparan tersebut, dapat dilihat bahwa perubahan politik dan situasi keamanan di Irak pascainvasi belum mampu menjamin hak-hak perempuan di Irak, sehingga dalam penelitian ini akan dianalisis lebih jauh mengenai perjuangan gerakan perempuan pascainvasi Amerika Serikat di Irak.

1.2 Rumusan Masalah

Invasi militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat membawa dampak yang luas dan kompleks, dan perempuan menempati porsi terbesar sebagai korban dalam konflik ini. Isu ini pun menjadi sorotan oleh masyarakat internasional, tidak

⁴³ *NGO's Coalition of CEDAW Shadow Report*. “Iraqi Women in Armed and Conflict Post Conflict Situation.” (February, 2014)
http://iknowpolitics.org/sites/default/int_cedaw_ngo_irq_e.pdf (Diakses Juni 2015)

hanya sebagai kritik terhadap tindakan Amerika yang dinilai sebagai bentuk hegemoni maskulin melalui kebijakan luar negerinya, tapi juga menyorot mengenai tumbuh dan berkembangnya struktur patriarki yang sangat kental pascainvasi dan semakin memarjinalkan hak asasi perempuan di Irak. Dalam merespon isu ini, perempuan Irak mengorganisir diri dalam kelompok masyarakat sipil yang tersebar di berbagai daerah untuk mencapai emansipasi dalam ruang lingkup masyarakat di Irak. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis kemunculan gerakan kaum perempuan dalam memperjuangkan hak asasi perempuan pascainvasi di Irak.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah *bagaimana bentuk gerakan sosial perempuan pascainvasi militer Amerika Serikat untuk membentuk regulasi negara dalam menjamin hak-hak perempuan di Irak?*

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan perjuangan perempuan di Irak melalui gerakan sosial dalam memperjuangkan hak-hak mereka pascainvasi di Irak.

1.5 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan kepustakaan Ilmu Hubungan Internasional tentang isu gender dan perempuan di Irak serta perkembangan kajian feminisme dan gerakan sosial dalam studi HI.

1.6 Studi Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, terdapat sejumlah literatur atau penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Pertama, untuk memahami tentang sejarah dan perkembangan kehidupan perempuan di Irak, penulis merujuk pada penelitian **Nadje Al-Ali** dan **Nicola Pratt** (2009) dalam bukunya yang berjudul *What Kind of Liberation: Women and the Occupation of Iraq*⁴⁴. Dalam tulisan ini, Nadje dan Nicola secara jelas mendeskripsikan secara rinci mengenai kebangkitan gerakan perempuan di Irak sebagai respon terhadap marjinalisasi yang dialami perempuan pada masa pascainvasi. Penelitian ini berlangsung selama kurang lebih tiga tahun, mulai awal tahun 2004 hingga 2007.

Al-Ali dan Pratt melakukan wawancara langsung dengan sejumlah aktivis perempuan baik yang berada di Irak maupun di luar Irak (diaspora), seperti London dan Amerika Serikat. Dalam penelitian ini, Al-Ali dan Pratt fokus kepada bentuk gerakan feminis transnasional (*transnational feminist*) oleh organisasi-organisasi perempuan Irak. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah terletak pada perspektif yang digunakan, dimana penulis menganalisis kebangkitan gerakan perempuan di Ira melalui perspektif feminisme liberal serta bentuk gerakan perempuan di Irak sebagai sebuah gerakan sosial.

⁴⁴ Nadje Al-Ali and Nicola Pratt. *What Kind of Liberation: Women and the Occupation of Iraq*. (Berkeley: University of California Press, 2009)

Selanjutnya, Nadjie Al-Ali dan Nicola Pratt (2008) juga menulis sebuah jurnal yang berjudul *Women's Organizing and Conflict in Iraq since 2003*⁴⁵, di mana tulisan ini menganalisis mengenai kemunculan dan perkembangan gerakan perempuan di Irak sejak invasi tahun 2003. Dalam penelitiannya ini, Nadjie menggambarkan berbagai macam tipe dari aktivitas serta strategi aktivis perempuan yang masing-masing memiliki perbedaan baik dari segi ideologi maupun latar belakang keanggotaan, misalnya saja seperti kelompok aktivis perempuan lokal dan diaspora yang terkadang menimbulkan gesekan dan pertentangan. Tulisan ini juga mendiskusikan mengenai dampak okupasi dan meningkatnya kekerasan di Irak yang menjadi pemicu aktivisme perempuan dan objek dari perjuangan mereka. Di dalam tulisan ini juga dijelaskan beberapa perbedaan cara pandang dalam masing-masing organisasi, namun tujuan utama mereka tetap sama yaitu untuk perbaikan dan perdamaian di Irak. Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian ini adalah penulis fokus pada bentuk gerakan sosial perempuan Irak serta perjuangan mereka untuk membentuk regulasi terkait hak asasi perempuan pascainvasi di Irak.

Lalu, tulisan dari **Mona Lena Krook, Diana Z. O'Brien** dan **Krista M. Swip** (2010) dengan judul *Military Invasion and Women's Representation*⁴⁶ secara umum berfokus pada analisis mengenai pergerakan dan keterlibatan perempuan dalam lingkup publik pascainvasi militer Amerika Serikat ke Irak dan Afghanistan. Dalam jurnal ini dijelaskan mengenai keterlibatan dan respon aktor internasional pascainvasi dan kerjasama mereka dalam pemberdayaan perempuan

⁴⁵ Nadjie Al-Ali and Nicola Pratt. "Women's Organizing and the Conflict in Iraq Since 2003." *Feminist Review Journal*, 88. (Palgrave, 2008).

⁴⁶ Mona Lena Krook, Diana Z. O'Brien, and Krista M. Swip. "Military Invasion and Women's Political Representation." *International Feminist Journal of Politics* 12:1 (Routledge, 2010).

di Irak dan Afghanistan. Namun dalam pembahasan penelitian ini, penulis lebih memfokuskan pada perempuan di Irak, di mana dalam tulisan ini dipaparkan bahwa perjuangan kelompok perempuan di Irak menunjukkan perkembangan yang positif dengan berhasilnya para perempuan mengorganisir suatu bentuk protes dan gerakan untuk menuntut hak politik di parlemen hingga pada akhirnya Dewan Pemerintahan Irak menyepakai untuk memberikan 25% kuota bagi perempuan di pemerintahan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada perspektif serta fokus permasalahan mengenai bentuk gerakan perempuan di Irak terkait pembentukan regulasi hak asasi perempuan pada konstitusi Irak.

Studi pustaka selanjutnya adalah untuk melihat posisi dan peran perempuan dalam konflik, penulis merujuk pada tulisan **Adinda Tenriangke Muchtar** dengan judul *Perempuan dalam Konflik*⁴⁷ yang dimuat sebagai *chapter* pertama dalam buku *Gender dan Hubungan Internasional*. Dalam tulisan ini dijelaskan mengenai peran dan posisi perempuan dalam konflik, karena dalam dinamikanya meskipun perempuan seringkali menempati posisi terbesar sebagai korban, tetapi perempuan juga dapat berperan sebagai aktor yang terlibat langsung dalam konflik, misalnya saja sebagai kombatan. Selain itu, dalam tulisan ini Adinda menggunakan perspektif feminis liberal untuk menganalisis keterlibatan keterlibatan perempuan sebagai aktor non-negara dalam isu hubungan internasional, serta melihat pentingnya suara dan posisi perempuan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan atau resolusi konflik baik pada level domestik maupun internasional. Dalam tulisan ini muncul argumen bahwa

⁴⁷ Ani Soetjipto dan Pande Trimayuni (ed.) *Gender dan Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Jalasutra, 2013).

mengacu pada pandangan feminis tentang gender dan HI, khususnya terkait dengan kajian keamanan, posisi dan keterlibatan perempuan dalam konflik harus dilihat secara *bottom-up*. Ketentuan internasional terkait perempuan dan perlindungan HAM juga dibahas di dalam tulisan ini, seperti Pasal 1 dalam CEDAW, Deklarasi Beijing dan Platform Aksi, Resolusi 1325 DK PBB, dan sebagainya yang menunjukkan kepedulian global dan pengakuan masyarakat internasional mengenai isu gender dalam hubungan internasional sebagai sebuah permasalahan global. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus permasalahan, di mana penulis melihat posisi perempuan dalam konflik sebagai bentuk gerakan sosial perempuan dalam teori gerakan sosial, selain itu penelitian penulis juga berfokus pada situasi pascakonflik di Irak.

Terakhir adalah tesis yang disusun oleh **Kelly Kidwell Hughes** dengan judul *Resisting Occupation and Authoritarianism Iraqi Feminist Movements After the U.S Invasion*⁴⁸, di mana dalam tesis ini dijelaskan mengenai gerakan perempuan ke dalam organisasi politik dan kemanusiaan pascainvasi Amerika ke Irak. Hughes menggunakan teori gerakan sosial (*social movement theory*) untuk menganalisis bagaimana para perempuan Irak mengorganisir dirinya untuk mencapai hak-hak mereka yang belum sepenuhnya tercapai pascakonflik. *Social movement theory* oleh Charles Tilly yang digunakan untuk mempelajari organisasi perempuan dapat menentukan apakah organisasi-organisasi tersebut membentuk sebuah kesatuan gerakan sosial dan bagaimana langkah mereka dalam mengkampanyekan hak-hak perempuan.

⁴⁸ Kelly Kidwell Hughes. *A Thesis: Resisting Occupation and Authoritarianism Iraqi Feminist Movements after The U.S Invasion* (Washington D.C., Georgetown University, 2012)

Tilly secara jelas mendefinisikan gerakan sosial sebagai sebuah gerakan dan menunjukkan perbedaan antara gerakan sosial dengan sebuah organisasi ataupun bentuk lainnya. Gerakan sosial sebagai bentuk politik yang mana orang secara bersama-sama mendesak perubahan yang akan mengacaukan struktur kekuasaan yang telah ada. Selain itu, di dalam tesis ini gerakan sosial perempuan dibedakan dari dua perspektif, yaitu feminis liberal dan feminis Islam yang mana perspektif ini akan menunjukkan pendefinisian hak asasi perempuan secara berbeda serta perbedaan bentuk aktivitas yang dilakukan perempuan di Irak dalam menuntut hak-hak mereka. Penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian penulis, namun perbedaannya terletak pada ruang lingkup penelitian yaitu dalam konteks kajian Hubungan Internasional, serta fokus pada kebangkitan gerakan sosial perempuan dalam perspektif feminisme liberal yang menuntut pembentukan regulasi hak asasi perempuan, serta keterlibatan aktor internasional dan aturan internasional dalam memandang hak asasi perempuan.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Feminisme Liberal

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan perspektif feminis liberal di mana perspektif ini dapat menjadi landasan berpikir dalam menganalisis kemunculan gerakan perempuan di Irak pascainvasi. Feminisme merupakan kajian mengenai gerakan dari dan untuk perempuan dalam posisi sebagai subjek dari ilmu pengetahuan. Hingga tahun 1980-an, peran gender (seperti hubungan antara seks dan *power*) dalam teori dan praktik hubungan internasional secara umum terabaikan, mengapa perempuan tidak dimasukkan dalam analisis negara,

ekonomi politik internasional, dan keamanan internasional.⁴⁹ Selama beberapa dekade terakhir, feminisme muncul sebagai perspektif kritis dalam studi hubungan internasional. Cynthia Enloe (2007) yang merupakan salah satu feminis liberal dalam HI menjelaskan bahwa feminisme meletakkan perempuan – pengalaman mereka, ide, tindakan, pemikiran mengenai perempuan, usaha untuk meyakinkan dan menggerakkan mereka di arena utama politik internasional serta permasalahan mengenai maskulinitas.⁵⁰

Feminisme merupakan satu set pemahaman yang kompleks untuk melihat bagaimana kekuasaan berjalan, bagaimana kekuasaan dilegitimasi dan bagaimana kekuasaan dilanggengkan. Peneliti feminis meneliti bentuk dari kekuasaan yang dikonstruksi dan merujuk pada apa yang secara konvensional dibayangkan sebagai ruang ‘privat’ (di dalam rumah, dalam keluarga, lingkungan pertemanan), serta bentuk-bentuk dari kekuasaan yang berpegang pada apa yang diasumsikan sebagai ruang ‘publik’ (pemilu, pengadilan, sekolah, televisi swasta, bank, pabrik garmen dan basis militer).⁵¹

Feminisme liberal yang merupakan salah satu aliran pemikiran dalam feminisme meyakini bahwa kesetaraan dan keadilan gender akan bisa dicapai dengan menghapuskan hambatan yang bersifat regulatif (yang berkaitan dengan peraturan hukum), serta hal lain yang berkaitan yang mengabaikan hak-hak dan kesempatan perempuan yang sama dengan laki-laki. Kajian utama perspektif ini yaitu mengintegrasikan perempuan dalam tatanan politik global di semua

⁴⁹ Martin Griffiths, Terry O’Callaghan, Steven C. Roach. *International Relations: The Key Concepts* (New York: Routledge, 2008), 110

⁵⁰ Cynthia Enloe, “Feminism,” in *International Relations Theory for the Twenty-First Century, An Introduction*, ed. Martin Griffiths (New York: Routledge, 2007), 99

⁵¹ *Ibid*

tingkatan.⁵² Salah satu upaya yang dilakukan oleh kaum feminis liberal untuk mencapai kesetaraan dan kebebasan bagi perempuan adalah dengan melalui gerakan perempuan seperti yang dilakukan oleh gerakan perempuan di Turki pada tahun 1980-an.⁵³ Zuhul Yesilyurt Gunduz (2004) dalam tulisannya mengenai perjuangan kelompok perempuan di Turki menjelaskan bahwa gerakan perempuan di Turki memegang peranan penting dalam proses pembentukan demokrasi dan perjuangan terhadap hak-hak perempuan. Salah satu aksi dalam skala besar yang dilakukan oleh kelompok gerakan perempuan Turki adalah penyampaian petisi dengan total tujuh ribu tanda tangan perempuan pada 8 Maret 1988 yang ditujukan kepada Parlemen Turki untuk menuntut implementasi CEDAW, tindakan ini memaksa pemerintah untuk menandatangani CEDAW, meskipun dengan beberapa pengecualian yang disesuaikan.⁵⁴

Selain itu, feminisme liberal mendokumentasikan berbagai aspek dari subordinasi perempuan, misalnya saja pendekatan ini berusaha untuk menganalisis masalah khusus dari pengungsi perempuan, ketidaksetaraan pendapatan antara laki-laki dan perempuan, serta pelanggaran hak asasi manusia secara tidak proporsional yang terjadi terhadap perempuan seperti perdagangan dan pemerkosaan dalam perang. Perspektif ini melihat perempuan di dalam insititusi dan praktik politik global serta mengamati bagaimana kehadiran (atau

⁵² Ani Soetjipto dan Pande Trimayuni, 12

⁵³ Omer Caha. *Women and Civil Society in Turkey: Women's Movements in a Muslim Society* (New York: Routledge, 2016), 75

⁵⁴ Zuhul Yesilyurt Gunduz. "The Women's Movement in Turkey: From Tanzimat Towards European Union Membership." *Perceptions* 116 (2004), 119

ketidakhadiran) mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuatan kebijakan internasional⁵⁵.

Jill Steans dan Lloyd Pettiford juga menjelaskan bahwa kaum feminis memusatkan perhatian pada perempuan, karena mereka percaya bahwa perempuan telah mengalami diskriminasi dan mendapatkan perlakuan yang tidak setara.⁵⁶ Feminisme juga merupakan suatu pandangan yang melakukan perlawanan, yang dikonstruksi dari sudut pandang atau pengalaman-pengalaman suatu kelompok yang termarjinalkan.⁵⁷ Oleh karena itu, feminisme liberal dapat digunakan sebagai perspektif dalam menganalisis kemunculan gerakan perempuan yang menuntut pemenuhan hak-hak mereka sebagai kelompok yang termarjinalkan dalam konteks pascainvasi di Irak.

1.7.2 Keamanan dalam Perspektif Feminisme

Ketika keamanan dilihat melalui sudut pandang feminisme, maka lebih banyak permasalahan yang dapat diidentifikasi.⁵⁸ Enloe dalam bukunya *Banana, Beaches, and Bases* menunjukkan bahwa perang yang dapat dilakukan oleh negara adalah tindakan yang tidak hanya merugikan negara yang lebih lemah, tapi juga perempuan yang ada di dalamnya.⁵⁹ Kritik ini terutama ditujukan terhadap salah satu perspektif *mainstream* dalam HI, yaitu realis, yang cenderung memandang sempit pengertian dari konsep keamanan atau dari cara pandang tradisional.

⁵⁵ Tickner, J. Ann and Laura Sjoberg. *Feminism*. Chap. 10 in Dunne, T., Kurki, M. and Smith, S. (eds.) *International Relations Theory: Discipline and Diversity*. 1st ed. (New York: Oxford University Press. 2007), 188

⁵⁶ Jill Steans dan Lloyd Pettiford. *Hubungan Internasional: Perspektif dan Tema* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 321

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ "Gender dan Hubungan Internasional." 98

⁵⁹ *Ibid*

Menurut perspektif feminisme, perlu adanya redefinisi konsep tentang keamanan oleh para aktor dalam hubungan internasional karena paradigma yang terbentuk mengenai konsepsi keamanan itu sendiri sangatlah kaku. Jindy Pettman di dalam jurnal penelitiannya yang berjudul *Feminist International Relations After 9/11* menjelaskan bahwa tragedi 11 September⁶⁰ telah memunculkan kritik mengenai perang oleh para sarjana feminis hubungan internasional. Mereka mengkritik pemahaman mengenai terminologi keamanan dan solusi yang sangat kaku atas tindakan militer.⁶¹

Dunia internasional yang muncul sebagai dunianya laki-laki, dominasi maskulinitas dalam perilaku bahkan juga dalam disiplin ilmu, telah membentuk cara pandang aktor-aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan keamanan dalam cara pandang yang maskulin.⁶² Maskulinitas sendiri dapat diukur dari *power*, kebebasan, dan kemandirian, di mana cara pandang ini sangat berkaitan erat dengan perspektif kaum realis dan neorealis yang melihat elemen-elemen maskulinitas sebagai sifat alamiah dari perilaku negara.⁶³

Perspektif realis cenderung memisahkan antara politik domestik dan internasional, serta bersandar pada asumsi tentang perilaku negara yang anarki. Kaum neorealis juga hampir sejalan dengan kaum realis dengan berfokus pada struktur sistem internasional yang anarki, di mana tidak ada aktor yang lebih tinggi dari negara untuk dapat mengatur perilaku negara, sehingga hal tersebut

⁶⁰ 11 September ditandai sebagai tindakan terorisme diabad ke 21 yang menyerang gedung pusat keamanan Amerika, Pentagon dan WTC, serangan ini tidak hanya menyebabkan jatuhnya korban dan kerugian secara material, tapi juga menimbulkan teror pada masyarakat dunia dan Amerika khususnya, serangan ini diklaim dilakukan oleh Al-Qaeda.

⁶¹ Jan Jindy Pettman. "Feminist International Relations After 9/11." *Brown Journal of World Affairs: Vol x, Issue 2* (United States: Brown University, 2004), 90

⁶² Charlotte Hooper. *Manly States: Masculinities, International Relations, and Gender Politics* (New York: Columbia University Press, 2001), 10

⁶³ *Ibid*, 11

mempengaruhi tindakan aktor negara dalam sistem internasional.⁶⁴ Pendekatan tersebut juga cenderung mengabaikan struktur dan kebijakan domestik dalam konteks keamanan, dengan kata lain, juga mengabaikan elemen-elemen lain dalam negara, seperti masyarakat (termasuk perempuan) dan lingkungan hidup. Faktor-faktor inilah yang menimbulkan kritik dari kaum feminis, yaitu redefinisi konsep keamanan secara lebih luas, multidimensi dan multilevel. Penelitian feminisme juga cenderung dimulai dari level paling bawah (individu) atau *bottom-up*. Penstudi feminis berargumen bahwa seharusnya isu keamanan dilihat secara lebih luas, lebih menyeluruh, sehingga, bentuk-bentuk dari kekerasan dapat dikurangi, seperti kemiskinan, pemerkosaan, kekerasan domestik, subordinasi gender, ekonomi, hingga pada kehancuran ekologi (lingkungan hidup).⁶⁵

1.7.3 Teori Gerakan Sosial Tilly

Charles Tilly mendefinisikan sebuah gerakan sosial atau *social movements* sebagai bentuk politik di mana sejumlah orang secara bersama-sama mendesak untuk dilakukannya perubahan yang akan mengacaukan struktur kekuasaan yang telah ada sebelumnya.⁶⁶ Dalam bukunya yang berjudul *Social Movements, 1768-2004*, Tilly melihat gerakan sosial sebagai bentuk khas dari perdebatan politik, di mana perdebatan ini melihat gerakan sosial yang melibatkan pembuatan klaim atau tuntutan secara bersama. Jika hal tersebut terealisasikan maka kemungkinan akan menimbulkan pertentangan dengan kepentingan orang lain, baik pemerintah

⁶⁴Tickner, J. Ann and Laura Sjoberg. *Feminism*. Chap. 10 in Dunne, T., Kurki, M. and Smith, S. (eds.) *International Relations Theory: Discipline and Diversity*. 1st ed. (New York: Oxford University Press. 2007) 192

⁶⁵*Ibid*, 193

⁶⁶ Kelly Kidwell Hughes, hal: 2

ataupun aktor lain yang terkait dalam klaim tersebut.⁶⁷ Menurut Tilly, perkembangan kemunculan gerakan sosial setidaknya terdiri dari tiga elemen, yaitu:

1. *Campaign*, sebagai bentuk dari gerakan sosial maka orang-orang harus berpartisipasi dalam kampanye yang berkelanjutan, menyusun strategi dan menggerakkan masyarakat dalam rangka menyampaikan klaim secara kolektif;
2. *Social movement repertoire* yang mencakup berbagai aktivitas, seperti *public meeting*, unjuk rasa ataupun penyampaian petisi;
3. Tampilan *WUNC*, partisipan yang merepresentasikan *worthiness* (kelayakan), *unity* (kesatuan), *numbers* (jumlah), dan *commitment* (komitmen) atau Tilly mengistilahkannya sebagai WUNC.⁶⁸

Istilah WUNC sendiri mungkin terdengar asing, namun merepresentasikan sesuatu yang sebenarnya cukup familiar karena WUNC dapat ditunjukkan melalui beberapa bentuk seperti pernyataan, slogan, ataupun label yang berisi *worthiness*, *unity*, *numbers*, dan *commitment*.⁶⁹ Sebuah gerakan sosial dapat merefleksikan *worthiness* melalui kampanye secara sadar dan menemukan tokoh yang berpengaruh untuk mendukung isu yang dipermasalahkan. *Unity* dapat tercermin misalnya saja dengan memakai pakaian yang seragam ataupun nyanyian dan berbaris bersama. Lalu, untuk mengukur jumlah (*numbers*) dari masyarakat yang berpartisipasi dalam pergerakan dapat dilihat dari tanda tangan pada petisi ataupun peserta unjuk rasa. Dan yang terakhir adalah *commitment* yang dapat

⁶⁷ Charles Tilly. *Social Movements, 1768-2004* (Boulder, Paradigm Publisher, 2004), 3

⁶⁸ *Ibid*, 3-4.

⁶⁹ *Ibid*, 4

ditunjukkan dengan protes yang berlanjut pada waktu yang lama ataupun di dalam kondisi yang sulit. Tampilan WUNC ini merupakan contoh dari tindakan konkret partisipan dalam gerakan sosial yang dapat menekan aktor-aktor yang berkuasa untuk memenuhi tuntutan mereka.

Definisi mengenai gerakan sosial yang dijelaskan oleh Tilly dapat digunakan untuk mendefinisikan sebuah bentuk gerakan sosial secara jelas dan membedakan gerakan sosial dari jenis organisasi lainnya ataupun bentuk dari ekspresi politik.⁷⁰ Tilly menjelaskan bahwa gerakan sosial bukanlah bentuk dari sebuah organisasi, tapi merupakan tindakan kolektif yang berasal dari berbagai macam organisasi.⁷¹ Selain itu, Tilly juga melihat perbedaan antara sebuah gerakan sosial dan bentuk aksi protes yang terisolir atau tertutup dengan mensyaratkan bahwa sebuah gerakan sosial harus melakukan kampanye yang berkelanjutan seperti yang tertuang dalam WUNC, sehingga dengan adanya definisi ini akan memberikan arahan yang jelas untuk menentukan bentuk ataupun aktivitas seperti apa yang tergolong ke dalam bentuk gerakan sosial.

Penelitian ini akan menitikberatkan pada perjuangan perempuan di Irak melalui sebuah gerakan sosial dengan melihat bahwa perempuan di Irak juga bergerak sebagai aktor yang aktif dalam usaha rekonstruksi pascainvasi di Irak. Perkembangan gerakan perempuan di Irak dapat dianalisis melalui bagaimana perempuan berusaha untuk mengartikulasikan kepentingan atau tujuannya, kecenderungan cara pandang gerakan feminis liberal di Irak dalam mendefinisikan hak-hak perempuan dan respon mereka terhadap kebijakan perang, serta usaha mereka untuk mempengaruhi pemerintah dan terlibat dalam lingkup politik di

⁷⁰ Kelly Kidwell, 3

⁷¹ *Ibid*, 3-4.

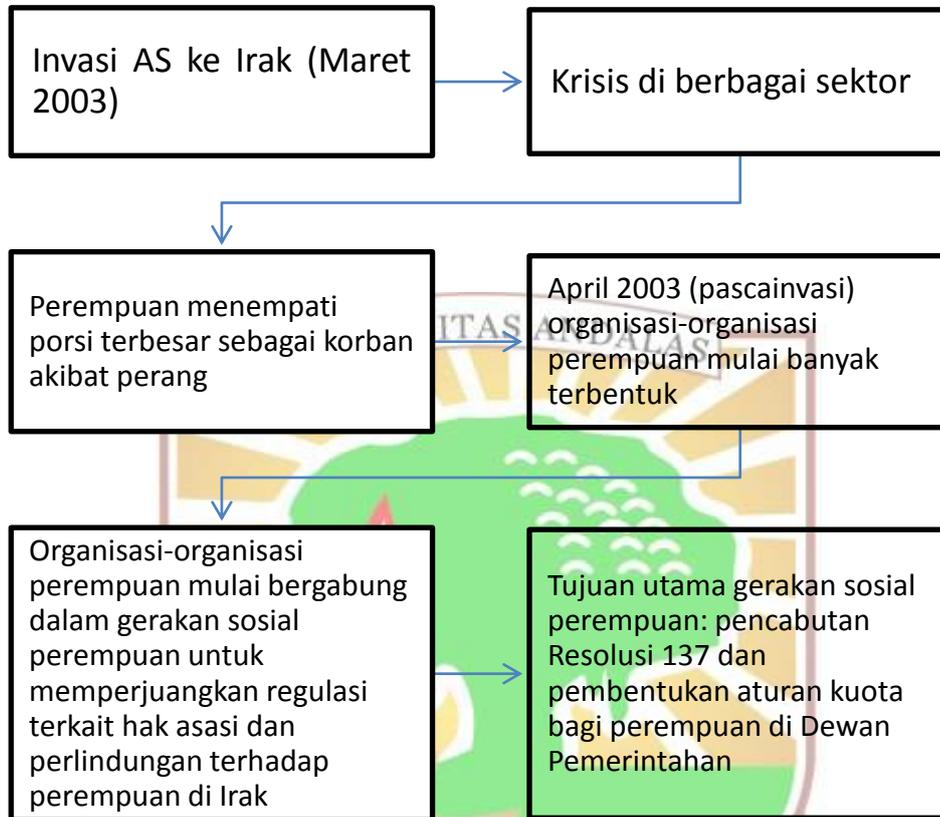
Irak.⁷² Secara garis besar, skema alur penelitian ini dapat dilihat melalui gambar berikut.



⁷² *Ibid*

Skema 1.1

Peta Pemikiran Penelitian



1.8 Metodologi Penelitian

Metodologi merupakan teori dan analisis tentang bagaimana seharusnya riset akan dilakukan, atau ilmu tentang metode-metode yang berisi standar dan prinsip-prinsip dasar yang digunakan sebagai pedoman penelitian.⁷³ Menurut Mohtar Mas' oed, metodologi adalah serangkaian prosedur yang dipakai dalam mendeskripsikan, menjelaskan dan meramalkan fenomena.⁷⁴ Berbeda dengan metodologi, metode merupakan teknis pelaksanaan pengambilan data di

⁷³ Elli Nur Hayati. *Ilmu Pengetahuan+Perempuan=...* dalam *Jurnal Perempuan* (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2006), 8

⁷⁴ Mohtar Mas' oed. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (Jakarta: LP3ES, 1990), 2

lapangan.⁷⁵ Penggunaan metodologi merujuk pada proses intelektual yang mengarahkan pada refleksi mengenai hubungan antara asumsi epistemologi⁷⁶, perspektif ontologis, tanggung jawab etis, dan pilihan metode.⁷⁷

1.8.1 Metodologi dalam Penelitian Feminisme

Studi feminisme mulai memasuki HI pada akhir tahun 1980-an, di mana kebanyakan feminis HI menolak metodologi-metodologi positivistis dan cenderung pada sisi postpositivist.⁷⁸ Penelitian feminis didorong oleh tujuan-tujuan emansipatori untuk menelisik kehidupan perempuan yang sering terabaikan dalam negara atau lembaga dan struktur internasional dengan tujuan mengubah mereka.⁷⁹ Feminis HI sering memulai penelitiannya dengan model *bottom-up*.⁸⁰

Patti Lather (1991) menekankan bahwa penelitian feminis melihat gender sebagai prinsip dasar yang membentuk kondisi dari kehidupan perempuan.⁸¹ Feminisme menggunakan gender sebagai sebuah konstruksi sosial dan variabel dari kategori analisis untuk meneliti dinamika kekuasaan dan hierarki gender.⁸² Lalu, pertanyaan utama yang muncul dalam penelitian feminis yaitu mengapa di hampir seluruh kelompok masyarakat, perempuan dirugikan baik secara politik, sosial,

⁷⁵ Elli Nur Hayati, hal: 8

⁷⁶ *Epistemologi merupakan pembahasan mengenai bagaimana kita memperoleh pengetahuan*, dikutip dari Gender dan Hubungan Internasional, 6

⁷⁷ Brooke Ackerly et al., *Feminist Methodologies for International Relations* (New York: Cambridge University Press, 2006), 6

⁷⁸ Alexander Wendt et.al., *Metodologi Ilmu Hubungan Internasional*, ed. Asrudin, Mirza Suryana, Musa Maliki (Malang: Intrans, 2014), 168

⁷⁹ *Ibid*

⁸⁰ *Ibid*

⁸¹ John W. Creswell. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (California: Sage Publications, 2007), 25-26

⁸² Brooke Ackerly et al., 24

dan ekonomi dibandingkan dengan laki-laki serta sejauh mana politik internasional dan ekonomi global berperan dalam hal ini.⁸³

Penelitian feminis mencoba untuk menggali dan memahami ketidaksetaraan hierarki gender, seperti bentuk hierarki kekuasaan lainnya yang ada di seluruh lapisan masyarakat, serta efeknya terhadap subordinasi perempuan dan orang-orang yang termarginalkan dengan tujuan untuk mengubah struktur tersebut.⁸⁴ Agenda utama feminisme yaitu dengan “menambahkan perempuan” (*adding women*) dalam kajian dan analisis ilmu pengetahuan karena eksistensi perempuan dalam membangun ilmu pengetahuan telah terabaikan.⁸⁵ Sandra Harding (1987) menjelaskan bahwa ada tiga tipe perempuan yang muncul sebagai aktor dalam proses ini: ilmuwan sosial perempuan (*women social scientist*), perempuan yang berkontribusi dalam kehidupan publik, dan perempuan yang menjadi korban dari dominasi laki-laki.⁸⁶ Namun, dalam perkembangannya *victimologies* juga memiliki batasan, di mana perempuan tidak melulu hanya sebatas menjadi korban dari dominasi laki-laki, tapi sebaliknya, mereka juga menjadi aktor yang melawan dominasi laki-laki. Artinya, perempuan dapat menjadi agen sosial baik untuk kepentingan kelompok mereka sendiri ataupun orang lain.⁸⁷

Pengalaman perempuan juga merupakan hal penting dalam penelitian feminis karena pengalaman perempuan seringkali dianggap sebagai hal yang remeh, ataupun dianggap penting hanya ketika berhubungan dengan pengalaman

⁸³ *Ibid*

⁸⁴ *Ibid*, 22

⁸⁵ Elli Nur Hayati, 11

⁸⁶ Sandra Harding (ed.). *Feminism and Methodology: Social Sciences Issue* (Bloomington and Indianapolis, Indiana University Press, 1987), 4

⁸⁷ *Ibid*, 5

laki-laki.⁸⁸ Hal yang mendasar dalam metodologi feminis adalah bahwa pengetahuan harus dibangun dan dianalisis dengan cara yang dapat digunakan oleh perempuan untuk mengubah berbagai bentuk opresi yang mereka hadapi.

Menurut Patricia Maguire (1987), feminisme adalah sebuah terminologi yang mencakup tiga komponen: 1) keyakinan bahwa secara universal perempuan ditindas dan dimanfaatkan, 2) komitmen untuk memahami dan mencari akar masalah yang menyebabkan hal tersebut, serta 3) komitmen untuk bekerja, baik secara individual maupun kelompok, untuk memperbaiki situasi tersebut.⁸⁹ Dalam penelitian feminisme, sangat sulit untuk menentukan metode khas feminis karena pembahasan mengenai metode (teknik yang dipakai untuk mengumpulkan bukti) dan metodologi (teori dan analisis mengenai bagaimana penelitian seharusnya dilakukan) saling terjalin satu sama lain.⁹⁰

1.8.2 Refleksivitas

Menurut Sandra Harding (1987), kebanyakan penelitian feminis menekankan bahwa peneliti harus berada pada posisi yang setara dengan subjek yang diteliti karena hanya dengan cara ini peneliti diharapkan mampu menghasilkan pemahaman dan penjelasan yang bebas dari distorsi keyakinan peneliti.⁹¹ Keistimewaan metodologi feminis baik di dalam maupun diluar konteks studi HI terletak pada refleksivitas yang mana menjadi pendorong bagi peneliti untuk terus mempertanyakan keilmuan mereka sendiri, membawa isu-isu

⁸⁸ Brooke Ackerly et al, hal: 25

⁸⁹ Elli Nur Hayati, hal: 12

⁹⁰ Sandra Harding. *Feminism and Methodology: Social Sciences Issue* (Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1987), 1

⁹¹ *Ibid*, 27

perempuan yang cenderung termarginalkan, serta memahami secara lebih mendalam mengenai isu yang berkaitan dengan perempuan.⁹²

Sikap refleksi dibangun berdasarkan respon terhadap penelitian yang androsentris⁹³ yang mengklaim bebas nilai. Refleksi juga melibatkan asumsi-asumsi tentang relasi gender yang berlangsung di sekitar subjek penelitian, dengan kata lain penelitian feminis bersifat kontekstual, *located*, dan *situated*.⁹⁴ Mary Cook dan Judith Fonow (1986) menolak asumsi yang mempertahankan kesenjangan antara peneliti dan subjek penelitian yang dianggap akan menghasilkan pengetahuan yang lebih valid.⁹⁵ Tujuan utama dari penelitian feminisme ini adalah mampu berkontribusi untuk pemberdayaan kehidupan perempuan.⁹⁶

1.8.3 Pengetahuan sebagai Emansipasi

Para peneliti feminis mengkritik pernyataan bahwa ide dapat dipisahkan dari tindakan dan pengetahuan dipisahkan dari praktik, sebaliknya mereka mengklaim bahwa penelitian feminis tidak dapat dipisahkan dari gerakan historis untuk perbaikan kehidupan perempuan.⁹⁷ Tujuan dari penelitian feminis adalah pemberdayaan perempuan, peneliti feminis harus menyadari perubahan sosial yang terjadi di sekitar subjek penelitian. Menurut Code (1991), peneliti feminis juga cenderung meyakini bahwa emosi dan kecerdasan merupakan kedua unsur

⁹² Brooke Ackerly et al, 4

⁹³ *Androsentris* berpusat pada laki-laki, kata ini sering digunakan para feminis untuk menunjukkan keberpihakan pada laki-laki di hampir segala hal, dikutip dari *Jurnal Perempuan* (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2006), 111

⁹⁴ Rachmad Hidayat. *Kapan Ilmu Akan Berubah?: Lebih Dekat Kepada Metodologi Feminis*, dalam *Jurnal Perempuan* (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2006), 33

⁹⁵ Brooke Ackerly et al, hal: 27

⁹⁶ *Ibid*, 28

⁹⁷ *Ibid*, 28-29

yang saling melengkapi, bukannya menjadi sisi yang saling berlawanan dalam konstruksi pengetahuan.⁹⁸

1.8.4 Batasan Penelitian

Batasan waktu dalam penelitian ini yaitu rentang waktu pascainvasi militer Amerika Serikat di Irak dari tahun 2003 hingga tahun 2005, di mana waktu ini menjadi periode penting dimulainya bentuk gerakan perempuan oleh berbagai organisasi perempuan secara masif sebagai kaum yang termarginalkan untuk menyuarakan kepentingan mereka bersama dan terlibat dalam upaya pembentukan regulasi negara terkait hak asasi perempuan di Irak. Peneliti melihat bahwa periode pada masa transisi ini lebih kompleks dan menjadi sumber dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh perempuan Irak hingga hari ini.

Dalam penelitian feminis, pengalaman perempuan merupakan sumber pengetahuan dan pusat dari penelitian.⁹⁹ Pengalaman-pengalaman perempuan inilah yang digunakan untuk menunjuk serta menganalisis struktur-struktur yang lebih besar. Maka penelitian ini berfokus pada pengalaman-pengalaman perempuan yang menyebabkan terbentuknya gerakan perempuan di Irak yang muncul akibat opresi dan termarginalkannya hak-hak perempuan pascainvasi. Selanjutnya, P\pengalaman-pengalaman inilah yang memicu terbentuknya organisasi-organisasi perempuan dan menyatu ke dalam bentuk gerakan sosial perempuan di Irak, serta lahirnya strategi dan upaya untuk mengatasi kesenjangan gender dan mencapai pemenuhan hak asasi perempuan Irak melalui regulasi negara.

⁹⁸ *Ibid*

⁹⁹ Misiyah. *Pengalaman Perempuan: Sumber Pengetahuan yang Membebaskan*, dalam *Jurnal Perempuan* (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2006), 48

1.8.5 Unit dan Tingkat Analisis

Dalam proses memilih tingkat analisis, maka peneliti harus menetapkan unit analisis, yaitu perilaku yang hendak dideskripsikan, jelaskan dan ramalkan, atau disebut juga dengan variabel dependen, serta variabel independen, atau disebut juga dengan unit eksplanasi, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel dependen.¹⁰⁰ Maka berdasarkan penjelasan tersebut, unit analisis dalam penelitian ini adalah gerakan sosial perempuan di Irak dan unit ekplanasi yang digunakan adalah Irak pascainvasi. Tingkat analisis yang ditetapkan dalam penelitian adalah negara.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian feminis dibutuhkan ketelitian dalam pengumpulan data. Hal tersebut didorong oleh beberapa hal, seperti kritik feminis terhadap tradisi positivis yang androsentris, bersifat objektif, logis, menekankan pada data statistik, cenderung maskulin dan hierarkis. Oleh sebab itu, penelitian feminis cenderung memilih metode kualitatif yang menekankan pada interpretasi, non-saintifik, subjektifitas dan feminitas.¹⁰¹

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan metodologi feminis yang lebih dekat dengan metode kualitatif. Metode kualitatif mengacu pada proses studi yang meneliti masalah di mana peneliti melakukan penelitian dalam keadaan alami (*natural setting*) dan membangun analisis kompleks dengan cara deskripsi dan penjelasan

¹⁰⁰ Mohtar Mas'oe'd, hal: 35

¹⁰¹ Dr. Jane Wambui. "An Introduction to Feminist Research." *African Women's Studies Centre, University of Nairobi* (2013) http://awsc.uonbi.ac.ke/uon_newsletters (Diakses Januari 2016), 1

yang kaya, serta kehatian-hatian dalam memilah data.¹⁰² Dalam penelitian ini, data yang akan diambil adalah data yang spesifik perempuan. Data yang spesifik perempuan ini maksudnya adalah data-data yang memuat pengalaman-pengalaman serta aksi-aksi gerakan sosial perempuan di Irak dalam kurun waktu yang telah ditentukan dalam penelitian ini. Data-data tersebut diperoleh melalui observasi dokumen serta pemahaman yang diperoleh dari studi dokumentasi, yang mana dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu bahan catatan tertulis (misalnya karya dan jurnal ilmiah, surat, teks dan dokumen tertulis) serta bahan narasi dan teks visual (film dan foto-foto dokumenter ataupun rekaman setiap ucapan).¹⁰³

1.8.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data-data yang terkait pengalaman perempuan dan berbagai bentuk aksi yang berhasil dikumpulkan menjadi sumber empiris dan teoritis dalam penelitian ini akan dikumpulkan, selanjutnya disusun sehingga menjadi sebuah fenomena yang berurutan, lalu dideskripsikan dan dianalisis. Analisis yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis interpretatif.¹⁰⁴

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

¹⁰² *Ibid*, 3

¹⁰³ Gumilar Rusliwa Somantri. "Memahami Metode Kualitatif." (Makara, Sosial Humaniora, Vol.9 No.2, Desember 2005), 60

¹⁰⁴ Muhayani. "Metodologi Penelitian Feminis: Kasus Perceraian." *Feminist Research Methodology: Divorce Case* (Egalita Journal for Gender Justice and Equality, Vol IV, No. 1, 2009), 11

BAB ini menggambarkan secara keseluruhan mengenai latar belakang masalah, tujuan penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, kerangka konseptual dan teoritik yang digunakan dalam penelitian, metodologi penelitian, batasan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II KONDISI IRAK PASCAINVASI AMERIKA SERIKAT

BAB ini akan menjelaskan mengenai dampak invasi Amerika Serikat terhadap krisis yang terjadi di Irak, pembentukan pemerintahan pascainvasi, serta keterkaitan invasi dengan marginalisasi dan kekerasan yang dialami perempuan melalui penelusuran pengalaman-pengalaman perempuan pascainvasi Amerika di Irak.

BAB III KEMUNCULAN GERAKAN SOSIAL PEREMPUAN PASCAINVASI DI IRAK

BAB ini berisi mengenai pengertian dari hak asasi perempuan serta awal mula kemunculan berbagai organisasi perempuan di Irak hingga membentuk sebuah gerakan sosial perempuan. Selain itu, akan dijelaskan kemunculan gerakan perempuan di beberapa wilayah di Irak serta penjelasan mengenai sumber pendanaan untuk organisasi-organisasi perempuan di Irak.

BAB IV ANALISIS GERAKAN SOSIAL PEREMPUAN PASCAINVASI AMERIKA SERIKAT DI IRAK

BAB ini akan memaparkan hasil analisis penulis melalui proses interpretatif atau pemahaman mengenai pola dan upaya gerakan sosial perempuan di Irak dalam memperjuangkan pembentukan regulasi negara dalam menjamin hak-hak perempuan dalam kerangka konsep dan teori yang telah dijelaskan pada BAB Pendahuluan.

BAB V PENUTUP

BAB ini akan merangkum keseluruhan mengenai kesimpulan dan saran.

